

***Manajemen Pembiayaan Peningkatan Kualitas Kinerja Tenaga Kependidikan
Sekolah Dasar Negeri***

Amalia Desy Wahyuni, Abd. Aziz

Universitas Islam Negeri (UIN) Madura, Indonesia

Email: amaliadesywahyuni@gmail.com

Abstract

Educational finance management plays a strategic role in enhancing the performance quality of educational personnel. As an integral part of the education system, educational personnel require adequate financial support to improve their competencies, welfare, and work productivity. This study aims to examine the concept of financial management in the context of improving the quality of educational personnel. The research method employed is a literature review supported by field-based research, analyzing various academic sources related to educational finance management, budget management strategies, and their impact on the performance of educational personnel at UPTD SD Negeri Lombang Dajah 2. The findings indicate that the effectiveness of financing is highly dependent on performance-based planning, the optimization of resources, and transparent and accountable evaluation. Furthermore, the main challenges in financial management include limited budgets, inefficient fund distribution, and the lack of needs-based evaluation for educational personnel. Therefore, a more structured and competency-oriented financial policy is necessary. The implications of this study are expected to serve as a reference for policymakers in designing sustainable and effective financing strategies to support the development of educational personnel within the education system.

Keywords: *Financing management, educational personel, performance*

A. Pendahuluan

Peningkatan kualitas tenaga kependidikan merupakan salah satu faktor kunci dalam menunjang efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan. Tenaga kependidikan, yang mencakup berbagai peran administratif dan pendukung dalam institusi pendidikan, memiliki kontribusi yang signifikan terhadap kelancaran proses pembelajaran serta pengelolaan sumber daya pendidikan. Oleh karena itu, manajemen pembiayaan yang sistematis dan berbasis kinerja menjadi aspek yang esensial dalam mendukung peningkatan kualitas tenaga kependidikan. Pembiayaan pendidikan menurut Levin adalah proses dimana pendapatan dan sumber daya yang tersedia digunakan untuk menyusun dan menjalankan sekolah di berbagai wilayah dengan tingkat pendidikan yang berbeda.¹ Nanang Fattah berpendapat bahwa pembiayaan pendidikan merupakan jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan

¹ Risbon Sianturi, *Perencanaan Dan Penganggaran Pembiayaan Pendidikan: Konsep Dan Teknik* (Jawa Barat: EDU Publisher, 2024), 1.

penyelenggaraan pendidikan yang mencakup gaji guru, peningkatan profesional guru, pengadaan sarana ruang belajar, perbaikan ruang, pengadaan peralatan, pengadaan alat-alat dan buku pelajaran, ATK, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan dan supervisi pendidikan.²

Manajemen pembiayaan pendidikan merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk mengalokasikan, menggunakan, dan mengevaluasi sumber daya keuangan secara efektif guna mencapai tujuan pendidikan yang optimal.³ Dalam konteks tenaga kependidikan, pembiayaan dapat mencakup pelatihan dan pengembangan profesional, kesejahteraan, serta penyediaan fasilitas dan teknologi yang mendukung peningkatan produktivitas kerja. Pembiayaan yang dikelola dengan baik tidak hanya berdampak pada kesejahteraan tenaga kependidikan, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan secara keseluruhan. Namun, tantangan dalam pengelolaan pembiayaan peningkatan kinerja tenaga kependidikan masih menjadi isu yang kompleks. Keterbatasan anggaran, kurangnya efisiensi dalam pengalokasian dana, serta minimnya evaluasi berbasis kinerja menjadi beberapa hambatan utama dalam implementasi kebijakan pembiayaan pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan manajemen pembiayaan yang berbasis kebutuhan, transparansi, dan akuntabilitas guna memastikan bahwa setiap dana yang dialokasikan benar-benar berkontribusi terhadap peningkatan kualitas tenaga kependidikan.

SD Negeri Lombang Dajah 2 merupakan salah satu lembaga pendidikan pengguna dana BOS yang sampai saat ini mengalami keterbatasan anggaran. Tidak semua dana yang diterima mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan operasional maupun pengembangan sekolah. Namun demikian, lembaga tersebut tetap berkomitmen untuk mengatasi kondisi itu dengan berbagai strategi dan penyesuaian prioritas. Salah satunya juga dalam peningkatan kualitas tenaga kependidikan.

Berdasarkan paparan di atas, artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep manajemen pembiayaan dalam pendidikan, khususnya dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas kinerja tenaga kependidikan. Studi ini akan membahas bagaimana manajemen pembiayaan dalam peningkatan kualitas tenaga kependidikan, bagaimana implementasi dan bagaimana tantangan yang dihadapi dalam penerapan kebijakan pembiayaan tenaga kependidikan. Dengan demikian, diharapkan artikel ini dapat memberikan wawasan akademis yang dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan dalam kebijakan pendidikan, baik di tingkat institusi maupun pemerintah.

² Josef Papilaya, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan* (Sumatera Barat: CV. Azka Pustaka, 2022), 6.

³ Noor Fazariah Handayani dan Nadya Huda, "Manajemen Pembiayaan Pendidikan di SMA Negeri Pascadesentralisasi Pendidikan" *JAMP: Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan Volume 3 Nomor 4* (2020) 337.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di UPTD SD Negeri Lombang Dajah 2 yang beralokasi di Desa Baeler Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan. Sekolah ini terletak di wilayah strategis yang berada di kawasan pinggir kota, meskipun secara administratif termasuk dalam wilayah desa. Kondisi geografis ini menjadikan sekolah memiliki karakteristik unik, yakni berada di titik pertemuan antara dinamika pendidikan pedesaan dan tantangan urbanisasi. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa UPTD SD Negeri Lombang Dajah 2 merupakan lembaga pendidikan yang menunjukkan upaya aktif dalam meningkatkan mutu pendidikan, khususnya dalam pengelolaan pembiayaan dan pengembangan tenaga kependidikan, meskipun masih menghadapi keterbatasan anggaran. Dengan demikian, lokasi ini dianggap representatif untuk menggambarkan realitas lembaga pendidikan dasar yang berjuang mengoptimalkan potensi di tengah keterbatasan sumber daya.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif berbasis *field research*. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai manajemen pembiayaan pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kualitas kinerja tenaga kependidikan di UPTD SD Negeri Lombang Dajah 2. Melalui pengumpulan data secara langsung di lapangan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti dapat menggali fakta-fakta empiris serta dinamika pengelolaan anggaran di tingkat sekolah yang tidak dapat dijangkau melalui data kuantitatif semata. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti menangkap konteks sosial dan budaya yang memengaruhi kebijakan serta praktik manajerial dalam lingkup pendidikan dasar.

C. Pembahasan

1. Konsep Manajemen Pembiayaan Peningkatan Kualitas Kinerja Tenaga Kependidikan

Manajemen pembiayaan merupakan cabang dari manajemen yang berkaitan dengan pengelolaan aspek keuangan suatu entitas atau organisasi.⁴ Tujuan utamanya adalah untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya keuangan dengan cara yang menguntungkan dan berkelanjutan. Van Horne dan Wachowicz mengemukakan bahwa manajemen pembiayaan adalah pengelolaan aset, kewajiban dan keuangan untuk mencapai tujuan perusahaan yang melibatkan pengumpulan, perencanaan, pengelolaan, dan penggunaan dana. Sementara Gitman menjelaskan bahwa manajemen pembiayaan

⁴ Achmad Anwar Abidin, "Manajemen Pembiayaan Pendidikan Tinggi dalam Upaya Peningkatan Mutu (Studi Kasus pada Perguruan Tinggi Swasta Menengah di Surabaya)" *Jurnal Penjaminan Mutu Volume 3 Nomor 1* (2017) 89.

adalah studi tentang keputusan-keputusan yang membuat manajer keuangan, yang melibatkan keputusan investasi, pendanaan, dan dividen, yang akan membuat nilai dari perusahaan lebih tinggi dari pada nilai yang akan dihasilkan oleh alternatif yang ada.⁵ Dengan demikian, manajemen pembiayaan dalam pendidikan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan penggunaan sumber daya keuangan dalam sistem pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.

Sebagaimana yang telah dipaparkan pada latar belakang, bahwa manajemen pembiayaan memiliki peran strategis dalam menentukan tingkat pencapaian tujuan pendidikan. kinerja institusi pendidikan, baik dalam aspek akademik maupun non akademik sangat dipengaruhi oleh bagaimana dana dikelola secara efektif, efisien dan akuntabel. Istilah kinerja ini berasal dari kata *Job Performance* atau *Actual Performance* (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang di capai oleh seseorang). Menurut Moehariono mengemukakan bahwa, kinerja atau *performance* merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi.⁶ Kemudian pengertian kinerja menurut Miner bagaimana seseorang yang diharapkan dapat berfungsi dan berperilaku sesuai dengan tugas yang telah dibebankan kepadanya itulah kinerja.⁷ Sehingga, dalam praktik pendidikan di lapangan, kinerja merujuk pada tingkat keberhasilan lembaga pendidikan dalam mencapai tujuan operasional dan strategis yang tercermin melalui berbagai indikator seperti hasil belajar siswa, efektivitas pembelajaran, manajemen sekolah dan kepuasan *stakeholder*. Kinerja menjadi tolok ukur yang digunakan untuk menilai seberapa optimal proses pendidikan berjalan dan sejauh mana dampaknya terhadap peserta didik serta masyarakat luas.

Manajemen pembiayaan pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pendukung operasional lembaga, tetapi juga memainkan peran strategis dalam meningkatkan kinerja tenaga kependidikan. Dalam konteks ini, tenaga kependidikan mencakup seluruh personel non-guru yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan layanan pendidikan. Tenaga kependidikan mencakup pimpinan satuan pendidikan, penilik satuan pendidikan nonformal, pengawas satuan pendidikan

⁵ Yosefina Andia Dekrita, Emilianus Eo Kutu Goo, “*Manajemen Keuangan Perusahaan Teori & Praktik*” (Penerbit: CV Eureka Media Aksara, 2024).

⁶ Hendra, “Pengaruh Budaya Organisasi, Pelatihan dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada Universitas Tjut Nyak Dhien Medan” *Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen Volume 3 Nomor 1* (2020) 2-3.

⁷ Shanti Hartanto, “Penerapan Sistem Penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dalam Rangka Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat” *Aspirasi: Jurnal Ilmiah Administrasi Negara Volume 1 Nomor 1* (2016) 5.

formal, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga lapangan pendidikan, tenaga administrasi, psikolog, pekerja sosial, terapis, tenaga kebersihan sekolah, dan sebutan lain untuk petugas sejenis yang bekerja pada satuan pendidikan.⁸ Menurut Yahya, profesi tenaga kependidikan adalah pekerjaan yang dilakukan seseorang berkaitan dengan proses penyelenggaraan pendidikan yang dapat menghasilkan dan dilakukan dengan kemahiran, keterampilan, dan kecakapan tertentu serta didasarkan pada norma yang berlaku.⁹ Keberadaan mereka menjadi bagian integral dari sistem pendidikan yang efektif dan berkualitas. Secara konseptual, alokasi anggaran yang memadai dan dikelola secara profesional menjadi prasyarat bagi terciptanya iklim kerja yang produktif dan suportif bagi tenaga kependidikan.

Dalam manajemen pembiayaan untuk peningkatan kinerja tenaga kependidikan, meliputi perencanaan anggaran berbasis kinerja, optimalisasi sumber daya keuangan, model pembiayaan berkelanjutan serta monitoring dan evaluasi efektivitas pembiayaan. *Pertama*, perencanaan anggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*) merupakan pendekatan dalam pengelolaan keuangan yang menekankan keterkaitan antara alokasi dana dan hasil kinerja yang diharapkan.¹⁰ Dalam konteks pendidikan, pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap sumber daya keuangan yang dialokasikan memberikan kontribusi maksimal terhadap peningkatan mutu pendidikan, termasuk dalam peningkatan kinerja tenaga kependidikan.

Perencanaan anggaran berbasis kinerja mengacu pada sistem penganggaran yang menghubungkan pembiayaan dengan pencapaian *output* dan *outcome* yang terukur. Pendekatan ini menitikberatkan pada efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran, dimana setiap alokasi dana harus dikaitkan dengan indikator kinerja yang jelas. Dalam pendidikan, indikator ini dapat berupa peningkatan kompetensi tenaga kependidikan, produktivitas kerja, serta efektivitas layanan administrasi pendidikan.

Dalam implementasinya, perencanaan anggaran berbasis kinerja harus memperhatikan beberapa prinsip utama, yaitu: Orientasi pada hasil, mengacu pada anggaran disusun berdasarkan hasil yang ingin dicapai, bukan hanya sekadar jumlah dana yang dikeluarkan; Efisiensi dan efektivitas mengacu pada sumber daya dialokasikan untuk kegiatan yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kualitas tenaga kependidikan; Akuntabilitas dan transparansi mengacu pada setiap penggunaan anggaran

⁸ Nadiya Utari Safitri "Pendidik dan Tenaga Kependidikan" Universitas Negeri Padang 6.

⁹ Rusydi Ananda "Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan" Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI) (2018) 16.

¹⁰ Anita Wahyu Wijayanti dkk, "Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja di Kabupaten Pasuruan" *Jurnal Wacana Volume 15 Nomor 3* (2012) 10.

harus dapat dipertanggungjawabkan melalui sistem pelaporan dan evaluasi yang jelas; Evaluasi berkelanjutan mengacu pada kinerja tenaga kependidikan dievaluasi secara berkala untuk menilai efektivitas penggunaan anggaran dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.

Kedua, optimalisasi sumber daya keuangan. Optimalisasi sumber daya keuangan dalam manajemen pembiayaan pendidikan merupakan aspek krusial dalam meningkatkan kualitas kinerja tenaga kependidikan. Dalam konteks manajemen pendidikan, strategi pembiayaan yang efektif bertujuan untuk memastikan distribusi anggaran yang adil, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan institusi dalam rangka meningkatkan profesionalisme tenaga kependidikan.

Secara teoritis, optimalisasi keuangan dalam sektor pendidikan melibatkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Efisiensi tercermin dalam penggunaan anggaran yang minimal namun menghasilkan output maksimal, efektivitas memastikan bahwa pembiayaan benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas tenaga kependidikan, sedangkan akuntabilitas menuntut transparansi dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan. Strategi optimalisasi mencakup beberapa aspek utama, antara lain: Perencanaan anggaran berbasis kinerja; Diversifikasi sumber pendanaan; Efisiensi penggunaan anggaran; Pengawasan dan evaluasi keuangan.

Perencanaan anggaran berbasis kinerja, penyusunan anggaran harus mempertimbangkan kebutuhan nyata tenaga kependidikan, termasuk program pelatihan, peningkatan kesejahteraan, serta penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung produktivitas kerja. Dalam konteks desentralisasi, pengelolaan pendidikan yang efektif dapat memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan lokal dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan secara keseluruhan.¹¹ Dengan demikian, implementasi kebijakan desentralisasi dalam pendidikan dapat memberikan fleksibilitas bagi pemerintah daerah untuk menyesuaikan kebijakan dengan kondisi lokal yang spesifik.¹²

Diversifikasi sumber pendanaan, institusi pendidikan perlu menggali berbagai sumber pendanaan, baik dari pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat. Kemitraan dengan pihak eksternal dapat menjadi strategi yang efektif dalam meningkatkan kapasitas

¹¹ Toto Purwanto, Utang Suwaryo, and Rahman Mulyawan, "Desentralisasi Pendidikan (Studi Efektifitas Alih Kelola Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Umum Oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat)," *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik* 3, no. 1 (2020): 71, <https://doi.org/10.24198/jmpp.v3i1.26379>.

¹² Nancy Sofiani et al., "Kebijakan Desentralisasi Pendidikan Serta Implementasi Dalam Pendidikan Di Indonesia," *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmiah* 18, no. 1 (2024): 122, <https://doi.org/10.31869/mi.v18i1.5273>.

keuangan institusi. Kemitraan ini tidak hanya memperluas basis pendanaan, tetapi juga dapat memperkaya program pendidikan melalui kolaborasi dan berbagai sumber daya. Kolaborasi antara institusi pendidikan dan sektor swasta sangat penting untuk menciptakan inovasi dan meningkatkan kualitas pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Meningkatkan kolaborasi ini dapat menghasilkan solusi inovatif yang mendukung pengembangan pendidikan dan menjawab tantangan yang dihadapi oleh institusi pendidikan saat ini.¹³

Efisiensi penggunaan anggaran, pemanfaatan dana harus diarahkan pada program yang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas tenaga kependidikan, seperti pelatihan berkelanjutan, insentif berbasis kinerja, serta penyediaan teknologi pendukung pembelajaran. Pengawasan yang ketat dan evaluasi berkala akan membantu memastikan bahwa setiap langkah dalam pengelolaan keuangan pendidikan memenuhi standar akuntabilitas dan transparansi yang diharapkan. Pengawasan dan evaluasi yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran pendidikan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang telah ditetapkan.¹⁴

Pengawasan dan evaluasi keuangan, mekanisme monitoring dan evaluasi diperlukan untuk memastikan anggaran digunakan secara transparan dan akuntabel. Audit keuangan serta analisis dampak pembiayaan terhadap kinerja tenaga kependidikan menjadi langkah esensial dalam manajemen keuangan yang baik. Dengan demikian, penerapan strategi ini diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan melalui pengelolaan keuangan yang lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan pendidikan.¹⁵

Ketiga, model pembiayaan berkelanjutan. Dalam konteks manajemen pendidikan, pembiayaan berkelanjutan menjadi aspek fundamental dalam mendukung peningkatan kualitas kinerja tenaga kependidikan. Model pembiayaan berkelanjutan mengacu pada strategi pengelolaan keuangan yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek, tetapi juga memastikan ketersediaan sumber daya keuangan yang stabil dan berkesinambungan guna mendukung pengembangan profesionalisme tenaga kependidikan.

¹³ Masrianda, "Konsep Dasar Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan dalam Pengelolaan serta Pengalokasian Dana Pendidikan," *Jurnal Administrasi Pendidikan* 19, no. 2 (2022): 196, <https://doi.org/10.17509/jap.v29i2.46826>.

¹⁴ Ammar Navy and Agus Fahmi, "Strategi Implementasi Administrator Dalam School Budgeting Management," *Jurnal Visionary : Penelitian Dan Pengembangan Di Bidang Administrasi Pendidikan* 11, no. 1 (2023): 83, <https://doi.org/10.33394/vis.v11i1.7455>.

¹⁵ Masrianda, "Konsep Dasar Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan dalam Pengelolaan serta Pengalokasian Dana Pendidikan," 194.

Model pembiayaan berkelanjutan dalam pendidikan bertumpu pada prinsip efisiensi, efektivitas, diversifikasi sumber pendanaan dan akuntabilitas. Efisiensi menekankan pada optimalisasi penggunaan anggaran untuk menghasilkan output maksimal dalam peningkatan kompetensi tenaga kependidikan. Efektivitas mengacu pada sejauh mana investasi pendidikan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas tenaga kependidikan. Diversifikasi sumber pendanaan memungkinkan keberlanjutan keuangan melalui kombinasi pembiayaan dari sektor publik, swasta, dan masyarakat. Sementara itu, akuntabilitas memastikan pengelolaan keuangan yang transparan dan berbasis hasil (*outcome-based financing*).

Keempat, monitoring dan evaluasi efektivitas pembiayaan. Monitoring dan evaluasi dalam konteks pembiayaan tenaga kependidikan berorientasi pada tiga aspek utama, yaitu input keuangan, proses pengelolaan anggaran, dan *outcome* atau dampak terhadap tenaga kependidikan. Evaluasi input keuangan, analisis pada tahap ini berfokus pada ketersediaan sumber daya keuangan, baik yang berasal dari anggaran pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan cukup untuk mendukung program pengembangan tenaga kependidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Evaluasi proses pengelolaan anggaran, tahap ini menilai efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan, termasuk mekanisme distribusi dana, efektivitas pengawasan anggaran, serta akuntabilitas dalam penggunaannya. Salah satu pendekatan yang banyak digunakan adalah *zero-based budgeting* (ZBB), yang memastikan bahwa setiap pengeluaran memiliki justifikasi yang kuat dan berbasis kebutuhan aktual. Evaluasi *outcome*, dampak Pembiayaan terhadap Tenaga Kependidikan Evaluasi *outcome* dilakukan untuk mengukur sejauh mana pembiayaan telah meningkatkan kompetensi, kesejahteraan, serta motivasi kerja tenaga kependidikan. Beberapa indikator utama yang digunakan meliputi: peningkatan kompetensi tenaga kependidikan melalui pelatihan dan sertifikasi; kenaikan produktivitas dalam proses pembelajaran dan manajemen sekolah; tingkat kepuasan dan kesejahteraan tenaga kependidikan terkait insentif dan fasilitas pendukung.

2. Landasan Hukum dan Aturan Pelaksanaan Dana BOS

Dalam manajemen pembiayaan peningkatan kualitas kinerja tenaga kependidikan tentu berkaitan dengan pengelolaan dana BOS yang berguna untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan komponen penggunaan dana BOS. Dalam pelaksanaan pengelolaan dana BOS ini harus berpedoman pada ketentuan

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah.

Peraturan ini bertujuan untuk menyediakan pedoman yang jelas dan terstandarisasi dalam pengelolaan dana BOP PAUD, BOS, dan BOP Kesetaraan, sehingga dana tersebut dapat dimanfaatkan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam mendukung operasional pendidikan di Indonesia.

3. Perencanaan Anggaran Peningkatan Kualitas Tenaga Kependidikan

Secara konseptual, alokasi anggaran yang memadai dan dikelola secara profesional menjadi prasyarat bagi terciptanya iklim kerja yang produktif dan suportif bagi tenaga kependidikan. Kinerja mereka sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang terkait langsung dengan pembiayaan, seperti kepastian dan kelayakan honorarium atau gaji, penyediaan fasilitas kerja yang memadai, kesempatan pengembangan kompetensi melalui pelatihan atau diklat teknis dan penciptaan lingkungan kerja yang kondusif dan manusiawi melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukung.

Dalam implementasi pengelolaan dana BOS, salah satu tahapan krusial yang tidak dapat diabaikan adalah kegiatan perencanaan anggaran atau yang dikenal dengan istilah *budgeting*. Perencanaan anggaran merupakan proses awal yang sangat menentukan keberhasilan pengelolaan dana secara keseluruhan, karena di dalamnya tersusun rencana penggunaan dan yang sistematis, terukur dan sesuai dengan kebutuhan prioritas sekolah. Perencanaan yang matang akan memastikan bahwa setiap alokasi dana dapat digunakan secara optimal untuk mendukung berbagai program pendidikan yang ada.¹⁶

Dalam penataan anggaran pengelola keuangan butuh mencermati sumber-sumber keuangan yang terdapat baik itu bersumber dari orang tua murid, komite, masyarakat ataupun pemerintah, baik itu pemerintah wilayah ataupun pemerintah pusat. Tidak hanya itu, pengelola keuangan juga harus mencermati prinsip-prinsip hemat berdasarkan kebutuhan, terarah sesuai rencana dan tidak diperbolehkan memakai dana untuk keperluan di luar keperluan sekolah. Sehingga dana yang dikelola dengan perencanaan yang baik akan memberikan dampak yang lebih besar, termasuk dalam peningkatan kualitas tenaga kependidikan.¹⁷

Dalam kerangka reformasi tata kelola keuangan pendidikan yang transparan dan akuntabel, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan

¹⁶ Suci Hidayati et al., "The Concept Of Management And Utilization Of The Islamic Education Budget At SD Islam Al Maarif 01 Singosari," *AL-WIJDAN Journal of Islamic Education Studies* 8, no. 3 (2023): 384, <https://doi.org/10.58788/alwijdn.v8i3.2690>.

¹⁷ Ari Dwi Susanto, "The Impact of Implementing New Public Management, Performance Budget Reporting Models in Educational Institutions," *Journal of World Science* 2, no. 2 (2023): 288, <https://doi.org/10.58344/jws.v2i2.233>.

Teknologi (Kemendikbudristek) mengembangkan aplikasi ARKAS (Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah). ARKAS berfungsi sebagai alat bantu digital dalam menyusun, mengelola, dan melaporkan anggaran sekolah berbasis data yang terintegrasi. Secara substantif, ARKAS menjadi platform utama dalam perencanaan dan pelaporan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta dana-dana lainnya yang dikelola oleh satuan pendidikan. Aplikasi ini juga menjadi representasi dari implementasi prinsip transparansi fiskal, efisiensi birokrasi, dan penguatan akuntabilitas publik. Dengan memanfaatkan ARKAS, diharapkan pengelolaan anggaran dapat dilakukan secara lebih transparan dan akuntabel, sehingga memberikan dampak positif bagi kualitas pendidikan.

SD Negeri Lombang Dajah 2 dalam hal penyusunan anggaran sekolah, sangat terbantu dengan adanya sistem aplikasi ARKAS. Aplikasi ini memfasilitasi sekolah untuk menyusun dan mengelola berbagai anggaran kebutuhan sekolah secara lebih terstruktur, transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui ARKAS, sekolah dapat menyusun RKAS dengan lebih mudah karena sistemnya sudah terintegrasi dengan regulasi dan komponen pembiayaan yang disyaratkan oleh pemerintah. Selain itu, sekolah juga mendapat pendampingan dari Korwil Kecamatan Blega terkait dengan penggunaan aplikasi tersebut. Pendampingan ini sangat membantu dalam memahami teknis pengoperasian ARKAS maupun dalam hal-hal lain yang berkaitan dengan pengelolaan dana BOS.

Dalam proses perencanaan anggaran sekolah menggunakan Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS), salah satu prinsip dasar yang harus diperhatikan oleh satuan pendidikan adalah kepatuhan terhadap Standar Satuan Harga (SSH). SSH adalah pedoman harga satuan tertinggi untuk barang dan jasa yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan menjadi rujukan resmi dalam penganggaran belanja daerah, termasuk belanja pendidikan.¹⁸

Dalam integrasi sistem ARKAS, SSH berfungsi sebagai parameter validasi belanja, alat kendali viskal dan acuan perencanaan yang seragam. Sebagai parameter validasi belanja menunjukkan bahwa setiap komponen pengeluaran yang diinput ke dalam ARKAS akan divalidasi berdasarkan SSH yang berlaku di daerah tersebut.¹⁹ Harga yang melebihi SSH tidak akan disetujui oleh sistem, kecuali terdapat justifikasi dan otorisasi

¹⁸ Dedy Achmad K, "Perencanaan Pembiayaan Pendidikan (Studi Kasus di Sekolah Dasar)," *Pedagogia Jurnal Ilmu Pendidikan* 12, no. 2 (2016): 40, <https://doi.org/10.17509/pedagogia.v12i2.3326>.

¹⁹ Sapri Sapri et al., "Planning in the Implementation of School Operational Assistance in Regular SMPN and SATAP in Praya Barat District, Indonesia," *Path of Science* 9, no. 1 (2023): 2044-47, <https://doi.org/10.22178/pos.89-4>.

khusus. SSH berfungsi sebagai alat kendali fiskal untuk membatasi kemungkinan inflasi harga atau manipulasi anggaran, sekaligus menjamin efisiensi dan rasionalitas dalam penggunaan dana BOS dan sumber pendanaan lainnya.²⁰ Kemudian, SSH berfungsi sebagai acuan perencanaan yang seragam dan memungkinkan sekolah di wilayah yang sama memiliki standar harga yang sepadan, sehingga mendukung keadilan dan kesetaraan dalam alokasi anggaran antar sekolah.

SSH mencakup item-item pembiayaan yang relevan dengan tenaga kependidikan, yaitu honorarium tenaga kependidikan non-PNS (tenaga administrasi, penjaga sekolah, pustakawan, dll), biaya pelatihan atau pengembangan kompetensi, pembelian alat pendukung kerja (komputer, printer, alat tulis kantor, dll) serta biaya pemeliharaan fasilitas yang berkaitan dengan tugas mereka. Dengan memperhatikan SSH, maka satuan pendidikan tidak hanya menyesuaikan anggaran berdasarkan kebutuhan, tetapi juga berdasarkan batasan regulatif yang ditetapkan. Ini penting dalam mencegah terjadinya temuan audit dan memastikan pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel.

Dalam pengelolaan dana BOS, tahap *accounting* atau pembukuan merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari proses perencanaan anggaran, khususnya dalam penyusunan RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah). Meskipun *accounting* sering dipahami sebagai proses pencatatan keuangan yang terjadi setelah pelaksanaan anggaran, dalam praktiknya proses ini sudah mulai dipertimbangkan sejak tahap perencanaan. Hal ini karena seluruh kegiatan yang direncanakan dalam RKAS harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan akuntabel melalui sistem pembukuan yang rapi dan sistematis.

Setiap pos anggaran dalam RKAS tidak hanya disusun berdasarkan kebutuhan sekolah, tetapi juga harus dapat dicatat dan dilaporkan secara rinci sesuai dengan kode akun dan klasifikasi belanja yang berlaku. Oleh karena itu, pemahaman terhadap sistem *accounting* menjadi penting sejak awal perencanaan, agar tidak terjadi kesalahan dalam pencatatan, pengalokasian, maupun pelaporan penggunaan dana. Pada tahap pembukuan ini tidak sekadar mencatat arus keluar-masuk dana, tetapi mencerminkan bagaimana perencanaan dan realisasi anggaran dikonsolidasikan dalam bentuk dokumen resmi yang dapat diaudit. Salah satu dokumen kunci dalam proses ini adalah Lembar RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah).

²⁰ Rohmat Rohmat, Arny Lattu, and Mupaat Mupaat, "Evaluasi Kepuasan Pengguna Arkas Dengan Metode Eucs Dan Pieces (Studi Kasus : Kecamatan Nagrak)," *Jurnal Pendidikan Informatika Dan Sains* 11, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.31571/saintek.v11i1.3987>.

Namun, sebelum RKAS diinput secara digital ke dalam ARKAS, sekolah terlebih dahulu menyusun lembar RKAS secara manual. Langkah ini bertujuan untuk mempermudah proses perencanaan sekaligus memastikan bahwa seluruh kebutuhan sekolah telah dirumuskan secara matang dan sesuai dengan prioritas. RKAS manual berfungsi sebagai kertas kerja awal yang mencatat rincian kegiatan, jenis belanja, volume, harga satuan dan total anggaran berdasarkan hasil analisis kebutuhan serta merujuk pada ketentuan SSH dan petunjuk teknis penggunaan dana BOS. Dengan menyusun terlebih dahulu secara manual, pihak sekolah memiliki ruang untuk menelaah, mengoreksi dan menyempurnakan perencanaan sebelum akhirnya difinalisasi dalam bentuk digital melalui ARKAS.

SD Negeri Lombang Dajah 2 setiap kali menyusun anggaran di ARKAS selalu membuat terlebih dahulu perencanaannya secara manual. Sebelum masuk ke sistem ARKAS yang digital, sekolah memiliki gambaran lengkap, baik jumlah anggarannya, kegiatannya sampai ke kodenya. Hal ini dilakukan karena jika langsung di *input* ke sistem dan ternyata ada salah, misalnya nominalnya keliru atau kodenya kurang pas hal itu merepotkan. Harus dilakukan pergeseran anggaran dan itu prosesnya tidak cepat. Harus melakukan koordinasi, revisi ulang dan dapat mempengaruhi waktu pengesahan dari Dinas Pendidikan. Dengan dibuatnya terlebih dahulu secara manual, sekolah dapat mengecek kembali. Sehingga, ketika input ke ARKAS digital, sekolah hanya masukkan sesuai yang sudah disusun. Hal itu sangat membantu untuk menghindari kesalahan saat penginputan. Jadi, ARKAS manual ini semacam draft kerja sebelum masuk ke sistem resmi. Setelah diyakini semua sudah benar dan sesuai dengan kebutuhan sekolah, baru diajukan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan melalui Korwil Blega untuk disahkan.

Dengan demikian lembar RKAS manual, sangat membantu dalam proses pembukuan dan dokumentasi, karena seluruh perencanaan awal telah terdokumentasi dan dapat dijadikan referensi saat proses input di ARKAS berlangsung. Hal ini juga meminimalisir kesalahan input dan mempermudah pelacakan apabila terjadi revisi atau audit. Dengan demikian, penggunaan lembar RKAS yang terstruktur dan sistematis sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam penyusunan laporan keuangan.

4. Pengorganisasian dan Pelaksanaan Anggaran Peningkatan Kualitas Tenaga Kependidikan

Accounting dalam manajemen keuangan pendidikan meliputi dua prinsip. Pertama, pengurusan menyangkut kewenangan yang memastikan kebijakan menerima serta

mengeluarkan uang. Kedua, kepengurusan yang menindak lanjuti urusan yang pertama yaitu menerima, menyimpan serta mengeluarkan uang dalam pengelolaan keuangan, semestinya kepala sekolah membagikan arahan kepada staf yang diberikan tugas untuk mengelola keuangan sekolah.²¹ Lembar RKAS bukan hanya dokumen teknis, tetapi merupakan bentuk konkret dari perencanaan strategis berbasis kebutuhan sekolah, translasi visi-misi sekolah ke dalam rencana program dan kegiatan, pijakan formal dalam proses pencairan, pelaksanaan, dan pelaporan dana BOS.²²

Dalam sistem aplikasi ARKAS, Lembar RKAS sudah terintegrasi secara digital dan disusun berdasarkan komponen pembiayaan yang diatur dalam Permendikbudristek, termasuk batasan penggunaan anggaran, acuan Standar Satuan Harga (SSH), dan kriteria prioritas pendanaan. Pada SD Negeri Lombang Dajah 2, lembar RKAS yang ada di aplikasi ARKAS adalah hasil dari penginputan anggaran yang sebelumnya dibuat secara manual. Jadi sekolah merancang terlebih dahulu anggaran di RKAS manual, setelah diyakini benar, diinput ke ARKAS digital. Lembar RKAS dari ARKAS ini nantinya dipakai ketika ada audit, baik dari Dinas Pendidikan, BPK maupun Inspektorat.

Setelah RKAS disusun sebagai rencana awal, sekolah harus menjalankan dan mencatat semua kegiatan keuangan berdasarkan RKAS tersebut. Untuk itu, dibutuhkan beberapa dokumen pembukuan pendukung, yaitu Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu Kas Tunai, Buku Pembantu Bank dan Buku Pembantu Pajak. Dokumen-dokumen ini penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sekolah. Dengan adanya dokumen pembukuan yang lengkap, sekolah dapat meningkatkan pengawasan dan mengurangi potensi kesalahan dalam pengelolaan dana operasional.

Buku Kas Umum (BKU) mencatat semua transaksi masuk dan keluar dana BOS secara kronologis dan lengkap. Fungsinya untuk melacak arus kas harian sekolah, menjadi dasar laporan keuangan bulanan dan tahunan serta menunjukkan transparansi dalam pengelolaan dana.²³ Penggunaan Buku Pembantu Kas Tunai dan Buku Pembantu Bank juga membantu dalam memisahkan dan mengelola transaksi secara lebih efisien, sehingga memudahkan dalam proses audit dan evaluasi keuangan. Dokumen-dokumen

²¹ Devi Shinta Nur Isnaeni Shinta and Endang Sri Utami, "Perbaikan Pembukuan Dan Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Pada Lembaga POS PAUD Kenanga Kapanewon Nanggulan," *Rengganis Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 1 (2023): 48–58, <https://doi.org/10.29303/rengganis.v3i1.304>.

²² Nurul Qhoimah and Erni Munastiwi, "Analysis of School Financial Management in TK Negeri Pembina 2 Bantan Kabupaten Bengkalis," *As-Sabiqun: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini* 4, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.36088/assabiqun.v4i2.1777>.

²³ Prita Indriawati and Ririn Suyanti, "Analisis Manajemen Keuangan Sekolah Pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)," *ETNIK: Jurnal Ekonomi dan Teknik* 1, no. 12 (2022): 826–35, <https://doi.org/10.54543/etnik.v1i12.135>.

ini juga berfungsi untuk memenuhi standar akuntansi keuangan yang berlaku, memastikan bahwa laporan keuangan sekolah dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan.²⁴ Oleh karena itu, pengelolaan dokumen pembukuan yang baik menjadi kunci dalam mencapai tujuan transparansi dan akuntabilitas keuangan di sekolah. Pengelolaan yang efektif terhadap dokumen-dokumen ini akan membantu sekolah dalam memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi, yang penting bagi pengelolaan dana operasional sekolah.

Selanjutnya, dalam penerapannya Buku Pembantu Kas Tunai digunakan untuk mencatat transaksi kas yang dilakukan secara tunai. Ini membantu memisahkan transaksi tunai dari transaksi non-tunai (transfer bank). Buku Pembantu Bank digunakan untuk mencatat transaksi yang dilakukan melalui rekening bank sekolah. Biasanya digunakan untuk melihat riwayat mutasi rekening. Buku Pembantu Pajak digunakan untuk mencatat kewajiban dan pembayaran pajak yang timbul dari penggunaan dana BOS, seperti PPh dan PPN dari pembelian barang/ jasa.

Setelah tahap pembukuan selesai, maka selanjutnya adalah *auditing*. Auditing (Pengecekan) merupakan aktivitas yang berkaitan dengan pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan, serta pembayaran ataupun penyerahan uang yang dilakukan oleh bendahara kepada pihak-pihak yang berwenang.

Di lapangan, *auditing* dana BOS dilakukan secara terstruktur dan periodik, baik oleh pihak internal maupun eksternal. Dalam *auditing* dana BOS meliputi: Persiapan dokumen (RKAS, BKU, Buku Pengeluaran dan Laporan Pertanggung Jawaban); Kunjungan auditor dari dinas pendidikan, inspektoran dan BPK; Penyusunan laporan audit yang meliputi temuan-temuan, rekomendasi dan sanksi jika ada pelanggaran yang serius; Tindak lanjut oleh sekolah (Perbaikan SPJ yang belum lengkap dan pengembalian dana jika ada penggunaan yang tidak sah).

Aspek terakhir dalam implementasi manajemen pembiayaan adalah pertanggung jawaban. Pertanggungjawaban merupakan pelaporan yang merupakan bentuk pertanggungjawaban keuangan kepada internal lembaga ataupun eksternal yang menjadi stakeholder lembaga pendidikan.²⁵

Sekolah wajib melaporkan penggunaan dana BOS secara akuntabel, meliputi realisasi anggaran, dokumen pendukung (SPJ), dan pencatatan kas. Namun, implementasi

²⁴ Misbah Misbah et al., "Pengelolaan Manajemen Keuangan di SMP Islam Terpadu Permata Gemilang Kota Tangerang Selatan Tinjauan Balance Score-Card (BSC)," *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 5, no. 6 (January 22, 2023): 2808–19, <https://doi.org/10.47467/reslaj.v5i6.2597>.

²⁵ Syamsurizal, Oktavia Dewi Afja, Iswantir "Manajemen Keuangan Lembaga Pendidikan Islam" *Journal of Educational Management and Strategy (JEMAST) Volume 1 Nomor 2 (2022) 127-128*.

pembiayaan untuk peningkatan kualitas tenaga kependidikan kerap menghadapi hambatan, seperti alokasi anggaran yang minim dalam RKAS dan keterbatasan juknis BOS yang tidak fleksibel untuk insentif atau pelatihan tenaga kependidikan. Akibatnya, kebutuhan pengembangan kapasitas, terutama dalam menghadapi tuntutan digitalisasi administrasi, sering terabaikan.

Untuk mengatasi hal ini, diperlukan reorientasi perencanaan anggaran agar tenaga kependidikan dipandang sebagai aset strategis. Ini mencakup alokasi dana untuk insentif berbasis kinerja dan pelatihan. Selain itu, perluasan sumber pembiayaan alternatif seperti BOS Daerah, CSR, dan bantuan dari komite sekolah dapat membantu mendanai pengembangan kompetensi mereka. Penguatan literasi teknologi melalui pelatihan teknis dan pendampingan aplikasi digital juga sangat penting.

Terakhir, membangun budaya penghargaan dan partisipasi dengan melibatkan tenaga kependidikan dalam proses perencanaan hingga pelaporan akan meningkatkan rasa tanggung jawab dan motivasi kerja. Dengan strategi ini, manajemen pembiayaan sekolah dapat menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas tenaga kependidikan secara berkelanjutan.

D. Kesimpulan

Penerapan manajemen pembiayaan di satuan pendidikan saat ini telah mengalami pergeseran dari sekadar kegiatan administratif menuju proses yang lebih sistematis, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks tersebut, tenaga kependidikan memiliki peran strategis yang tidak dapat diabaikan. Mereka bukan hanya pelaksana teknis, tetapi juga penopang utama dalam menjaga kelancaran operasional sekolah, terutama dalam hal administrasi, pelaporan, dan pengelolaan sumber daya. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa perhatian terhadap tenaga kependidikan masih belum sepenuhnya proporsional. Alokasi anggaran yang minim, keterbatasan ruang dalam juknis penggunaan dana BOS, serta beban administrasi yang tidak dibarengi dengan peningkatan kapasitas, menjadi tantangan utama yang berdampak langsung pada performa kerja mereka. Dari pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa peningkatan kualitas kinerja tenaga kependidikan sangat bergantung pada bagaimana sekolah mengelola pembiayaan secara efektif dan inklusif. Perencanaan anggaran yang adil dan partisipatif, diversifikasi sumber dana, serta penguatan kompetensi melalui pelatihan dan pendampingan teknis merupakan elemen-elemen penting yang harus diintegrasikan dalam manajemen pembiayaan. Lebih jauh, pertanggungjawaban yang baik tidak hanya ditandai oleh kelengkapan dokumen laporan, tetapi juga oleh dampak nyata dari pembiayaan terhadap peningkatan kualitas layanan pendidikan. Maka, penguatan peran tenaga kependidikan melalui dukungan anggaran yang tepat sasaran adalah bagian dari investasi jangka panjang sekolah

dalam membangun mutu dan kredibilitas institusinya. Dengan demikian, manajemen pembiayaan yang responsif terhadap kebutuhan tenaga kependidikan tidak hanya menjawab tuntutan regulasi dan audit, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam menciptakan budaya kerja yang produktif, adaptif, dan berorientasi pada mutu pendidikan yang berkelanjutan.

Referensi

- Hidayati, Suci, Samsul Susilawati, Weyldan Bisri Habibi, Nyak Dara Najmatus Subhi, and Mulyono. "The Concept Of Management And Utilization Of The Islamic Education Budget At SD Islam Al Maarif 01 Singosari." *AL-WIJDÂN Journal of Islamic Education Studies* 8, no. 3 (2023): 382–95. <https://doi.org/10.58788/alwijdn.v8i3.2690>.
- Indriawati, Prita, and Ririn Suyanti. "Analisis Manajemen Keuangan Sekolah Pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)." *ETNIK: Jurnal Ekonomi dan Teknik* 1, no. 12 (2022): 826–35. <https://doi.org/10.54543/etnik.v1i12.135>.
- K, Dedy Achmad. "Perencanaan Pembiayaan Pendidikan (Studi Kasus di Sekolah Dasar)." *Pedagogia Jurnal Ilmu Pendidikan* 12, no. 2 (2016): 40. <https://doi.org/10.17509/pedagogia.v12i2.3326>.
- Masrianda. "Konsep Dasar Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan dalam Pengelolaan serta Pengalokasian Dana Pendidikan." *Jurnal Administrasi Pendidikan* 19, no. 2 (2022): 193–202. <https://doi.org/10.17509/jap.v29i2.46826>.
- Misbah, Misbah, Muhammad Yunus Rangkuti, Jonisar Jonisar, Iim Wasliman, Eva Dianawati, and Arman Paramansyah. "Pengelolaan Manajemen Keuangan di SMP Islam Terpadu Permata Gemilang Kota Tangerang Selatan Tinjauan Balance Score-Card (BSC)." *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal* 5, no. 6 (January 22, 2023): 2808–19. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v5i6.2597>.
- Navy, Ammar, and Agus Fahmi. "Strategi Implementasi Administrator Dalam School Budgeting Management." *Jurnal Visionary : Penelitian Dan Pengembangan Di Bidang Administrasi Pendidikan* 11, no. 1 (2023): 78–85. <https://doi.org/10.33394/vis.v11i1.7455>.
- Papilaya, Josef. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. Sumatera Barat: CV. Azka Pustaka, 2022.
- Purwanto, Toto, Utang Suwaryo, and Rahman Mulyawan. "Desentralisasi Pendidikan (Studi Efektifitas Alih Kelola Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Umum Oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat)." *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik* 3, no. 1 (2020): 58. <https://doi.org/10.24198/jmpp.v3i1.26379>.
- Qhoimah, Nurul, and Erni Munastiwi. "Analysis of School Financial Management in TK Negeri Pembina 2 Bantan Kabupaten Bengkalis." *As-Sabiqun : Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini* 4, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.36088/assabiqun.v4i2.1777>.
- Rohmat, Rohmat, Army Lattu, and Mupaat Mupaat. "Evaluasi Kepuasan Pengguna Arkas Dengan Metode Eucs Dan Pieces (Studi Kasus : Kecamatan Nagrak)." *Jurnal Pendidikan Informatika Dan Sains* 11, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.31571/saintek.v11i1.3987>.

- Sapri, Sapri, Sudirman Sudirman, Fahrudin Fahrudin, Sapri Sapri, Sudirman Sudirman, and Fahrudin Fahrudin. "Planning in the Implementation of School Operational Assistance in Regular SMPN and SATAP in Praya Barat District, Indonesia." *Path of Science* 9, no. 1 (2023): 2044–47. <https://doi.org/10.22178/pos.89-4>.
- Shinta, Devi Shinta Nur Isnaeni, and Endang Sri Utami. "Perbaikan Pembukuan Dan Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Pada Lembaga POS PAUD Kenanga Kapanewon Nanggulan." *Rengganis Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 1 (2023): 48–58. <https://doi.org/10.29303/rengganis.v3i1.304>.
- Sianturi, Risbon. *Perencanaan Dan Penganggaran Pembiayaan Pendidikan: Konsep Dan Teknik*. Jawa Barat: EDU Publisher, 2024.
- Sofiani, Nancy, Aldri Frinaldi, Lince Magriasti, and Yulia Septia Wahyuni. "Kebijakan Desentralisasi Pendidikan Serta Implementasi Dalam Pendidikan Di Indonesia." *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmiah* 18, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.31869/mi.v18i1.5273>.
- Susanto, Ari Dwi. "The Impact of Implementing New Public Management, Performance Budget Reporting Models in Educational Institutions." *Journal of World Science* 2, no. 2 (2023): 287–91. <https://doi.org/10.58344/jws.v2i2.233>.